



Collaborative Governance Dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru

Susilawati Susilawati

Universitas Riau

susilawatiwati206@gmail.com

Adianto Adianto

Universitas Riau

adianto@lecturer.unri.ac.id

Alamat : Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Panam,
Kota Pekanbaru, Riau 28293.

Korespondensi penulis : susilawatiwati206@gmail.com

Abstract. HIV/AIDS is an infectious disease which is a sensitive health issue to be discussed. HIV/AIDS can also cause loss of the immune system in humans. Pekanbaru City is the area with the most cases of HIV/AIDS in Riau Province. The purpose of this study was to find out collaborative governance in preventing HIV/AIDS in Pekanbaru City and to identify the inhibiting factors in preventing HIV/AIDS in Pekanbaru City. This study uses Purwanti's theory in Aziz Arrasyid (2021) which uses 3 indicators, namely: principled engagement, shared motivation and capacity for joint action. This study uses qualitative research with a case study approach. The informants of this study, namely the Pekanbaru City AIDS Commission (KPA), the Pekanbaru City Health Office and other related institutions conducted interviews, observations and documentation so that the required data were obtained such as primary data and secondary data and then analyzed so that conclusions could be drawn from the existing problems. The results of this study can be said to be not optimal, because there are still inhibiting factors in its implementation, namely the low participation of the community, especially the suspect community who are reluctant to admit to avoid discrimination from the surrounding community and the limited infrastructure provided.

Key words: Principled Engagement, Shared Motivation, Capacity For Joint Action

Abstrak. HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang menjadi isu kesehatan yang cukup sensitif untuk dibicarakan. HIV/AIDS juga dapat menyebabkan hilangnya sistem kekebalan tubuh pada manusia. Kota Pekanbaru merupakan daerah paling banyak terjadi kasus penyebaran HIV/AIDS di Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui collaborative governance dalam pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi faktor yang menghambat dalam pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori Purwanti dalam Aziz Arrasyid (2021) yang menggunakan 3 Indikator yaitu: principled engagement (keterlibatan berprinsip), shared motivation (motivasi bersama) dan capacity for join action (kapasitas untuk melakukan aksi bersama). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. informan penelitian ini yaitu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru serta lembaga terkait lainnya dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi sehingga didapatkan data yang dibutuhkan seperti data primer dan data sekunder kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari masalah yang ada. Hasil penelitian ini dapat dikatakan belum maksimal, karena masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu rendahnya partisipasi masyarakat terkhususnya masyarakat suspect yang enggan mengakui untuk menghindari diskriminasi dari masyarakat sekitarnya dan terbatasnya sarana prasarana yang disediakan.

Kata Kunci: Keterlibatan Berprinsip, Motivasi Bersama, Kapasitas Melakukan Aksi Bersama

LATAR BELAKANG

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang mengalami peningkatan penyebaran HIV dan AIDS upaya pemerintah daerah Provinsi Riau mencegah dan menanggulangi penyebaran HIV dan AIDS tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Pencegahan yang dimaksud adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular HIV/AIDS serta penanggulangan adalah upaya-upaya agar wabah HIV/AIDS tidak meluas di masyarakat. Dalam pasal 7 menyebutkan bahwa “pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan kebijakan yang menjamin efektivitas pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS untuk melindungi masyarakat dari penularan HIV/AIDS”.

Kasus HIV/AIDS mendominasi dikalangan milenial. Menurut pemerintah daerah penyebab tingginya kasus penyebaran HIV/AIDS dikarenakan pergaulan bebas, minimnya pengawasan orang tua, kurangnya tindakan antisipasi dari pihak terkait yang memiliki wewenang dan kurangnya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Data diatas cukup mengkhawatirkan, belum lagi ditambah dengan sifat kasus HIV/AIDS yang seperti fenomena gunung es, yang mana masih banyak kasus yang sebenarnya ada, tapi belum bisa terdeteksi, padahal Indonesia memiliki target pada tahun 2030 Indonesia terbebas dari penularan HIV/AIDS.

Tingginya temuan kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru dikarenakan layanan kesehatan khususnya layanan Konseling dan Tes Sukarela (KTS) atau VCT sudah lebih awal dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan kabupaten/kota yang lain di Riau. Puskesmas utama di seluruh Kota Pekanbaru sudah menyediakan layanan pemeriksaan HIV. Ditambah lagi dengan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. Disamping itu upaya penanggulangan berupa pemberian informasi juga lebih dahulu dilakukan. Semakin banyaknya infrastruktur layanan khususnya tes HIV dan AIDS mengakibatkan semakin banyak kasus yang terjaring dan ditemukan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat.

Dinas Kesehatan merupakan salah satu penanggung jawab pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu

1. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan, disini promosi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi pemberian pendidikan

berupa penyuluhan serta pemberdayaan kepada masyarakat akan bahaya HIV/AIDS dengan dua sasaran utama yaitu masyarakat yang beresiko terhadap HIV yang berarti semua masyarakat dan penderita dari HIV positif tersebut, pendidikan mengenai dasar-dasar HIV, bagaimana penularannya serta media-media apa saja yang dapat menularkannya;

2. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu kegiatan masalah atau penyakit. Disini ada beberapa upaya pencegahan yang dilakukan, untuk penderita yang ingin berhubungan dengan pasangannya diharuskan menggunakan alat pengaman (kontrasepsi), dilarang melakukan tranfusi dan donor darah, serta hal-hal yang dapat mengakibatkan penyeberan HIV dan AIDS tersebut;

3. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan akibat penderitaan penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Disini Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menyediakan obat-obat khusus bagi penderita supaya mereka tidak terkena penyakit lainnya karena penderita meninggal dunia bukan karena penyakit HIV dan AIDS itu sendiri melainkan karena sistem kekebalan tubuh yang lemah karena HIV menyebabkan penderita rentan akan penyakit lain dan mengakibatkan komplikasi penyakit, obat-obatan tersebut diharapkan dapat menekan serta meningkatkan system kekebalan tubuh penderita sehingga penderita tidak mudah tertular penyakit lainnya;

4. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Disini Dinas Kesehatan bekerjasama dengan mitranya melakukan upaya-upaya bagaimana penderita bisa meminum obat secara rutin, memberikan konseling, pendidikan serta motivasi-motivasi agar mereka dapat tetap kuat dalam menjalani kehidupan dan mampu kembali pada masyarakat.

Komitmen kuat semua unsur sangat dibutuhkan untuk memberikan penyadaran bahwa penularan HIV/AIDS adalah tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah hingga masyarakat saling bahu membahu menekan penularan HIV/AIDS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Pasal 3 yang berbunyi: “Subjek pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dalam peraturan daerah ini adalah seluruh masyarakat, pemerintah dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan yang dikoordinir dan

difasilitasi oleh KPA Provinsi”. Namun dalam prosesnya, dapat dikatakan bahwa dalam kolaborasi ini masih terdapat berbagai dugaan permasalahan dalam tahap-tahapannya, seperti pada tahapan deliberation (pertimbangan) terdapat komitmen terhadap tujuan dan saling percaya natar pemangku kepentingan yang belum optimal. Pada tahan implementation (implementasi) terdapat stigma dan diskriminasi terhadap ODHA baik dari masyarakat maupun pihak pemerintah. Selain itu juga kurangnya kemampuan SDM di lapangan. Sedangkan pada tahap assessment (penilaian) dan intitation (inisiasi) tidak terdapat dugaan permasalahan.

Tanggung jawab masyarakat dan juga LSM/swasta juga sudah diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2006 Pasal 15 yang berbunyi: “Masyarakat dan LSM memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan pendampingan ODHA termasuk menyediakan fasilitas dan pembiayaan yang selaras dengan strategi penanggulangan pada jenjang Provinsi, Kabupaten/Kota dalam koordinasi dan pembinaan KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Untuk mewujudkan hal tersebut pihak swasta dan masyarakat, khususnya masyarakat yang peduli dengan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru harus berkolaborasi dengan pihak lain seperti pemerintah karena pihak swasta dan masyarakat memiliki keterbatasan, seperti keterbatasan dana untuk pelaksanaan program, pengetahuan terkait pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, dan akses terhadap obat-obatan yang dibutuhkan.

Beberapa LSM yang bekerja sama dengan pihak KPA Kota Pekanbaru dalam Menangani masalah HIV/AIDS di Kota Pekanbaru terdiri dari:

1. Yayasan Sebaya Lancang Kuning
2. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Wilayah Riau
3. Yayasan Utama
4. Yayasan SIKLUS
5. Lembaga Swarna Lentera (LSL)
6. Jaringan Indonesia Positif (JIP)
7. Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Riau

Salah satu LSM yang peneliti ambil yang berfokus pada masalah HIV/AIDS di Kota Pekanbaru adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) wilayah Riau. PKBI memiliki tugas meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang HIV/AIDS dan mendorong adanya perubahan perilaku yang lebih sehat, agar terhidar dari HIV/AIDS dan tidak menularkan HIV/AIDS ke orang lain. Selain itu PKBI juga berperan dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang berhubungan dengan HIV/AIDS serta pihak PKBI juga aktif dalam melakukan penguatan maupun pengorganisasian kepada komunitas atau masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru.

Kendala yang dihadapi oleh pihak PKBI dalam mencegah HIV/AIDS di Kota Pekanbaru adalah Pertama, sulitnya melakukan edukasi atau pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang HIV/AIDS dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan dengan orang banyak. Sehingga pihak PKBI hanya melakukan edukasi melalui media sosial dan juga membuat brosur serta membagikannya kepada masyarakat secara online. Kedua, masih adanya masyarakat yang takut untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS dikarenakan mereka beranggapan bahwa mereka sehat-sehat saja. Sehingga untuk mengajak masyarakat melakukan pemeriksaan HIV/AIDS maka pihak PKBI memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk melakukan pemeriksaan. Ketiga, jadwal pemeriksaan yang sulit untuk menyesuaikan dengan kegiatan maupun aktivitas masyarakat. Sehingga pihak puskesmas membuka layanan pemeriksaan sampai sore.

Selain LSM pihak KPA Kota Pekanbaru juga bekerja sama dengan pihak swasta yang ada di Kota Pekanbaru. Pihak swasta memiliki beberapa peran antara lain: Pertama, memfasilitasi untuk penyebaran informasi tentang HIV/AIDS baik berupa penyuluhan atau penyebaran media informasi (brosur, leaflet dll). Kedua, memfasilitasi untuk pemeriksaan VCT atau tes HIV. Ketiga, melaksanakan pemberian informasi lanjutan secara mandiri.

KAJIAN TEORITIS

1. Governance

governance adalah hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya yang memungkinkan berbagai kebijakan publik dan program dirumuskan, dilaksanakan dan dievaluasi. Hal ini diperkuat dengan pendapat Andrew dalam Wirman Syafri (2012:196) yang memaknai governance sebagai cara dimana pemerintah bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dalam masyarakat, menerapkan kewenangan dan mempengaruhi dalam mengusahakan kesejahteraan masyarakat dan tujuan jangka panjang suatu bangsa. Boon dan Geraldine masih dalam wirman Syafri (2012:197) memaknai governance sebagai penentu berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang secara bersama mendorong untuk memudahkan interaksi kearah kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial yang lebih baik.

Governance sebagai program penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan service. Dan ditegaskan bahwa apabila dilihat dari aspek fungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau sebaliknya.

Menurut UNDP (United Nation Development Program) yang dikutip oleh (Nurbaeti & Nugraha, 2019:1301), governance terdapat tiga model tata pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut:

- a) Political governance yang mengacu pada proses pembuatan keputusan untuk merumuskan kebijakan (policy/strategy formulation)
- b) Economic governance yang meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi terhadap equity (kekayaan), provety (properti), serta quality of life (kualitas hidup).
- c) Administrative governance yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

2. Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah. Collaborative governance merupakan instrumen yang tepat untuk berkonfrontasi dengan masalah, sebab collaborative governance menciptakan “kepemilikan bersama” terhadap masalah tersebut. Berbagai aktor memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Bukan hal yang mudah untuk menciptakan suatu kepehaman diantara peran aktor tersebut. Collaborative governance berperan sebagai penengah agar para aktor dapat merumuskan kesepahaman yang sama terhadap suatu masalah (Ansell, 2014:172). Pemerintah tidak hanya mengandalkan kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan atau program kebijakan.(Purwanti dalam Rangi, 2016:203)

Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat

menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Dalam perumusan tujuan, visi-misi, norma dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing pihak bersifat setara yakni memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada kesepakatan bersama. (Purwanti dalam Aziz Arrasyid, 2021:914)

Collaborative governance merupakan suatu forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Donahue dan Zeckhauser dalam Arrozaq (2016:6) collaborative governance merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. Hal ini senada juga diungkapkan oleh Holzer et al. dalam Arrozaq (2016:6) yang menyatakan bahwa collaborative governance adalah kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat.

Edward DeSeve (dalam Sudarmo 2015) mendefinisikan collaborative governance adalah sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan definisi kesuksesan yang jelas. Agrawal dan Lemos dalam Rangg (2016:202) menjelaskan definisi collaborative governance tidak hanya terbatas pada stakeholder yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya “multipartner governance” yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat hybrid seperti halnya kerjasama publik-privat dan privat-sosial.

Ansell & Gash (2007) (dalam Setyoko 2011 : 15) berpendapat bahwa collaborative governance merupakan pengelolaan dari pemerintah yang melibatkan pihak terkait yang menitikberatkan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan yang nantinya bertujuan sebagai pedoman untuk melaksanakan segala kebijakan publik maupun program – program publik. collaborative governance ini lebih berfokus pada kebijakan publik dan masalah publik. Dimana suatu Institusi publik akan selalu menitikberatkan dalam proses pembuatan kebijakan, pembuatan tujuan serta dalam proses kolaborasi demi tercapainya derajat konsensus diantara pihak yang terlibat.

Menurut Setyoko dalam Syafri (2012:198) collaborative governance menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Kolaborasi pemerintah memberikan jaminan akan lebih partisipatifnya proses perumusan kebijakan sehingga

keluaran yang dihasilkan akan memberikan dampak luas dimasyarakat. Menurut O'Flynn dan Wanna dalam Purwanto (2015:137), collaborative governance membedakan dirinya dengan partnership melalui peran pemerintah didalamnya. Dalam partnership, pemerintah bekerja melalui sektor privat dan elemen masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan publik.

Walter dan Peter dalam Purwanto (2015:138) menyebut collaborative governance sebagai aktivitas yang tidak hanya melibatkan pengambilan keputusan, tetapi meliputi joint activities, joint structures, dan share resources. Purwanto (2015:138) mendefinisikan collaborative governance sebagai struktur dan proses manajemen serta pembuatan keputusan kebijakan publik dengan melihat orang-orang secara konstruktif berasal dari berbagai level pemerintah dan atau masyarakat, instansi-instansi publik, swasta, serta masyarakat sipil dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau mencapai tujuan publik yang tidak dapat terselesaikan oleh satu pihak saja.

Menurut O'Leary dan Bingham (dalam Sudarmo 2015 : 195) menyebutkan bahwa Kolaborasi merupakan suatu konsep yang menggambarkan tentang bagaimana proses dari fasilitasi dan pelaksanaan yang ada didalamnya melibatkan pihak - pihak diluar organisasi terkait untuk memecahkan persoalan yang tidak dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat dari O'Leary dan Bingham didukung oleh pernyataan dari Bardach dalam Sudarmo (2015 : 195) bahwa kolaborasi adalah bagian dari suatu bentuk kegiatan atau aktivitas bersama yang dilakoni oleh dua institusi ataupun lebih didalamnya dilakukan kerjasama guna mencapai dan meningkatkan nilai umum daripada bekerja sendiri-sendiri.

Menurut Balogh dalam Raggi (2016:202) collaborative governance merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Choi & Robertson dalam Asuti et al. (2020:43) mendefinisikan bahwa collaborative governance sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan didalamnya memiliki otoritas substantif dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholders memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut.

Collaborative governance membedakan dirinya dengan partnership melalui peran pemerintah didalamnya. Dalam partnership, pemerintah bekerja dengan membangun jejaring, koalisi, dan kemitraan yang bertujuan menciptakan pelayanan yang efektif dengan relasi

government to citizen. Pada collaborative governance, pemerintah bekerja melalui sektor privat dan elemen masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan publik (O'Flynn dan Wanna dalam Erwan, 2015:137). Menurut Erwan (2015:138) collaborative governance sebagai struktur dan proses manajemen serta pembuatan keputusan kebijakan publik dengan melibatkan orang-orang secara konstruktif berasal dari berbagai level pemerintah dan/atau masyarakat, instansi-instansi publik, swasta, serta masyarakat sipil dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau mencapai tujuan publik yang tidak dapat terselesaikan oleh satu pihak saja.

Menurut Dwiyanto dalam Wulandari (2019:27) menjelaskan bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi, dan aktivitas masing-masing pihak yang berkaitan. Tetapi mereka tetap memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama.

Collaborative governance juga dapat menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar aktor. Keinginan melakukan collaborative governance muncul karena para aktor menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian, aktor tersebut perlu menyatakan keinginan dan kesediaan mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan aktor lain. Tiap aktor yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki oleh aktor lain. Setelah para aktor berkomitmen untuk berkolaborasi, maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama kepada terhadap setiap proses kolaborasi (Ansell, 2014: 178)

Tujuan dari collaborative governance adalah sebagai pengetahuan yang menyatukan pihak publik dan swasta dalam membentuk suatu forum kolektif dengan lembaga-lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada consensus (Ansell dan Gash, 2007). Secara umum, collaborative governance muncul secara adaptif atau dengan sengaja disiptakan secara sadar karena beberapa alasan, yaitu kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam, dan upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik (Ansell dan Gash, 2009 dalam Sudarmo, 2011).

Kecenderungan dilakukannya collaborative governance dilatarbelakangi oleh perkembangan organisasi dan tumbuhnya pengetahuan dan kapasitas istitusi atau organisasi seiring dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari lingkungan selama organisasi tersebut bekerja dalam rentang waktu tertentu (Ansell dan Gash, 2009 dalam Sudarmo,

2011). Dengan demikian pemecahan masalah secara kolaborasi antar institusi menjadi hal yang lebih direkomendasikan atau justru merupakan sebuah kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bersifat analisis deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dengan berfokus pada suatu untuk diamati, kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, wawancara dengan narasumber terkait, dokumen dan laporan. Analisis secara deskriptif, yaitu data yang didapat dalam penelitian akan dijabarkan secara sistematis sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi dilapangan kemudian dilakukan analisis secara cermat terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat mengenai penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Collaborative Governance Dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru

1. Principled Engagement (Keterlibatan Berprinsip)

Berdasarkan pendapat dan tanggapan yang dikemukakan dapat diketahui bahwa principled engagement (keterlibatan berprinsip) berguna menyatukan semua hasil musyawarah untuk menanggulangi HIV/AIDS, dan hasil wawancara dari informan dan data yang didapat peneliti bahwa kerjasama yang terjadi oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, KPA Kota Pekanbaru dan PKBI Wilayah Riau sudah ada dan saling berkoordinasi.

Selain itu, principled engagement (keterlibatan berprinsip) yang dilakukan oleh antar sektor yaitu Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, KPA Kota Pekanbaru, PKBI, dan masyarakat memiliki tujuan yang sama yaitu memberantas permasalahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Dari adanya aktivitas berbagi informasi melalui rapat umum, diskusi terbuka, dan aktivitas yang berhubungan dengan komitmen yang ingin diwujudkan dalam Collaborative Governance tersebut memudahkan tiap sektor untuk mengambil peran dan tanggung jawab berkesesuaian fungsional organisasi masing

masing sektor, sehingga terjalin komitmen yang baik dengan rasa saling menghargai terhadap perbedaan fungsional yang dimiliki oleh masing-masing sektor. Adapun bentuk komitmen yang dilakukan oleh tiap sektor yang telah mengambil peran dalam pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru seperti Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru akan berfokus sebagai fasilitator, penyediaan sarana dan prasarana, serta penanganan kesehatan langsung terhadap masyarakat yang tersuspect HIV.

Pihak KPA Kota Pekanbaru akan menjadi wadah konsultasi masyarakat atau penanganan masalah sosial, agar masyarakat mendapatkan pengarahan dan informasi yang jelas perihal HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Sehingga Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru akan menjadi wadah dalam proses penanganan kesehatan terhadap masyarakat atau Individu yang terindikasi HIV. Penanganan sosial ini guna menjaga stabilitas kehidupan masyarakat terhadap pencegahan tindakan diskriminasi, dan cara penanggulangannya.

Sedangkan PKBI akan berfokus pada ranah penyuluhan yang profesional, guna memberikan wawasan perihal HIV/AIDS dan menarik partisipasi masyarakat untuk dapat melanjutkan proses ilmu yang diterima untuk disebarkan ke wilayah internal (keluarga) ataupun eksternal (masyarakat) dalam menghapus tindakan diskriminasi terhadap masyarakat yang terindikasi HIV, dan stigma (tabuh) pada pembahasan permasalahan seksualitas.

Masyarakat sendiri diharapkan mampu menerima proses penyebaran wawasan tersebut, sebab masyarakat sendirilah yang bersinggungan langsung dari kehidupan sosial. Permasalahan HIV/AIDS muncul dari permasalahan kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat juga lah yang mampu mengendalikannya. Adanya komitmen pada kriteria *principled engagement* (keterlibatan berprinsip) dalam *Collaborative Governance* pada pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru dapat diwujudkan dengan baik apabila masyarakat ikut mengambil andi pada komitmen tersebut.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan berprinsip antara Dinas Kesehatan, KPA Kota Pekanbaru dan PKBI Wilayah Riau ini sudah berjalan, namun peneliti masih melihat kurangnya partisipasi dari masyarakat dikarenakan penyebaran informasi yang belum sesuai dengan daya serap dan wawasan yang dimiliki oleh masyarakat.

2. Shared Motivation (Motivasi Bersama)

Berdasarkan pendapat dan tanggapan dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada masyarakat sangat penting agar kedepannya bisa meminimalisir masalah HIV/AIDS. Membangun sebuah kepercayaan dan motivasi sangat penting karena kepercayaan antar aktor merupakan poin awal dari proses kolaborasi, sebab proses kolaborasi tidak hanya pada dialog tatap muka tetapi juga membangun kepercayaan antar aktor. Membangun kepercayaan menjadi satu fase yang digunakan untuk membentuk proses saling memahami antara berbagai aktor baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat agar terbentuknya komitmen untuk menjalankan kolaborasi dalam menanggulangi masalah HIV/AIDS.

3. Capacity for Join Action (Kapasitas Untuk Melakukan Aksi Bersama)

Tujuan kolaborasi adalah untuk menghasilkan hasil yang diinginkan bersama yang tidak dapat diselesaikan secara terpisah. Himmelman (1994) dalam Emerson dan Nabatchi (2015) menjelaskan bahwa kolaborasi terlibat dalam aktivitas bersama untuk meningkatkan kualitas kapasitas dalam mencapai tujuan bersama. Kapasitas untuk melakukan aksi bersama merupakan aspek ketiga dari dinamika kolaborasi yang merupakan hasil dari keterlibatan berprinsip dan motivasi bersama. Kapasitas untuk melakukan aksi bersama terdiri dari elemen seperti prosedur dan kesepakatan institusi (procedural and institutional arrangements), kepemimpinan (leadership), pengetahuan (knowledge), dan sumber daya (resources).

Dinas Kesehatan membuat rencana strategis yang didalamnya terdapat program untuk menangani masalah HIV/AIDS dan pihak swasta dengan tujuan untuk mengurangi masalah HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Dari informasi yang diperoleh dapat diketahui bahwa kapasitas melakukan aksi bersama sudah berjalan melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama melalui program dan kesepakatan bersama.

B. Faktor-faktor yang Menghambat Collaborative Governance dalam Pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa hambatan yang didapati oleh pihak PKBI adalah daya serap informasi yang masih kurang, dan penyediaan sarana prasarana penyelenggaraan kegiatan. Sumber daya seperti pengetahuann yang dimiliki oleh masyarakat, serta penyediaan sarana prasaran merupakan satu hal yang mampu memberikan dampak penyelenggaraan sosialisasi yang efektif. Sarana prasarana merupakan media atau jembatan penghubung dalam memberikan bantuan kepada masyarakat perihal pencegahan HIV/AIDS

di Kota Pekanbaru. Sebagaimana sarana prasarana tersebut dapat berupa penyediaan ruang konseling, dukungan psikososial, bantuan obat-obatan dan lain sebagainya.

Dalam keseluruhan penyediaan sarana prasarana akan mendukung proses pencegahan penyebaran HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Maka untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan alokasi dana yang memadai, meningkatkan jumlah personel yang terlibat, memperbaiki infrastruktur, memberikan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, dan mengurangi kesenjangan aksesibilitas. Beberapa kelompok masyarakat mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses collaborative governance. Ketidaksetaraan akses ke teknologi informasi, transportasi yang terbatas, atau bahasa yang berbeda dapat menjadi hambatan bagi beberapa kelompok masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, disebutkan bahwa penyuluh sosialisasi HIV/AIDS dari pegawai dinas kesehatan kurang komunikatif, sehingga informasi yang disampaikan tidak efektif. Namun, dengan adanya kolaborasi, tugas penyuluhan dapat diberikan kepada aktor yang lebih profesional seperti PKBI, sehingga daya serap informasi masyarakat dapat lebih efektif. Pihak KPA Kota Pekanbaru juga menyatakan bahwa sarana prasarana dalam kolaborasi masih terbatas, terutama dalam penyelenggaraan sosialisasi, karena fokus dana kesehatan diarahkan kepada penanganan COVID-19. Selain itu, dalam wawancara dengan direktur PKBI Wilayah Riau, disebutkan bahwa hambatan yang dihadapi adalah kurangnya daya serap informasi masyarakat dan kurangnya penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan sosialisasi. Sarana prasarana berperan sebagai media atau jembatan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terkait pencegahan HIV/AIDS.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya peningkatan alokasi dana, peningkatan jumlah personel yang terlibat, perbaikan infrastruktur, penyediaan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, serta mengurangi kesenjangan aksesibilitas. Ketidaksetaraan akses terhadap teknologi informasi, transportasi yang terbatas, dan perbedaan bahasa juga dapat menjadi hambatan bagi kelompok masyarakat tertentu dalam berpartisipasi dalam kolaborasi pencegahan HIV/AIDS.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Collaborative Governance dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum maksimal. Dapat dilihat mulai dari kriteria principled engagement (keterlibatan berprinsip) yang dimana belum berjalan dengan baik, karena penyebaran informasi yang belum sesuai dengan daya serap dan wawasan yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya kriteria shared motivation (motivasi bersama) bahwa sosialisasi sudah dilakukan dengan tujuan meningkatkan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan HIV/AIDS juga belum baik, sebab penyebaran motivasi hanya berlangsung ketika dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat. Terakhir kriteria capacity for join action (kapasitas untuk melakukan aksi bersama) sudah berjalan dengan baik. Namun untuk penilaian kriteria ini bisa dikatakan berhasil jika masyarakat tidak enggan dan mulai berani mendorong dirinya untuk melakukan pemeriksaan HIV.
2. Faktor-faktor yang menghambat collaborative governance dalam pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru ada dua yaitu rendahnya partisipasi masyarakat terkhususnya masyarakat suspect yang enggan mengakui untuk menghindari diskriminasi dari masyarakat sekitarnya dan kurangnya anggaran biaya yang disediakan, sehingga sarana dan prasarana yang digunakan terbatas.

Saran

1. Agar collaborative governance dalam pencegahan HIV/AIDS dapat berjalan secara optimal dan efektif maka dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut (1) Dinas Kesehatan, KPA Kota Pekanbaru, PKBI Wilayah Riau dan Puskesmas perlu meningkatkan penyebaran informasi yang sesuai dengan daya serap dan wawasan masyarakat (2) Pihak pemerintah diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat dan meruntuhkan stigma serta dsikriminasi masyarakat mengenai HIV/AIDS (3) Para aktor yang terlibat sebaiknya lebih mengupayakan agar masyarakat dapat lebih terbuka terhadap penyebaran HIV/AIDS dan mau melakukan pemeriksaan bagi masyarakat yang beresiko.
2. Hal-hal lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi faktor-faktor penghambat dalam pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru adalah sebgai berikut: (1) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pemerintah perlu melibatkan peran dan serta

masyarakat khususnya generasi muda dalam pencegahan HIV/AIDS (2) Perlu adanya pengangara dana khusus yang ditujukan untuk penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru.

DAFTAR REFERENSI

- Adianto, & Prayuda, R. (2018). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Lingkungan (Studi Kasus Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit di kabupaten Rokan Hulu). *Good Governance*, Vol. 14 No 2, Hal: 1-14.
- Ansell, C. (2014). *Pragmatist Democracy: Evolutionary Learning as Public Philosophy*. New York: Oxford University Press, Inc.
- . (2007). *Collaborative Governance in Theory And Practice*. Berkeley: University of Callifornia.
- Arrasyid, M. A., & Adianto. (2021). Collaborative Governance dalam Pengembangan Objek Wisata Toluk Jangkang di kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Journal Publicuho*, Vol. 4 no. 3, 913-924.
- Arrozaaq Chusuma, D. L. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Universitas Airlangga.
- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 401-420.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. Universitas Diponegoro Press.
- Donahue, J. D., & Richard, J. Z. (2011). *Collaborative Governance: private rels for public goals in turbulent times*. New Jersey.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. UGM Press.
- Fauzi, A. R., & Rahayu, A. Y. (2019). Collaborative governance Penanganan HIV/AIDS di provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 7 No. 1, 1 - 11.
- . (2019). Pencegahan HIV/AIDS melalui Collaborative Governance antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat. *Jurnal Inspirasi*, Vol. 10, Hal: 14-31.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Jurnal Kajian Pemerintah*, II, 200-208.
- Haris, S. (2019). Governance: Perubahan Paradigma Pada Penyelenggaraan Pemerintah. *SOSFIKOM*, Vol. XIII No. 1, Hal: 33-47.
- Kusnadi, I. H. (2019). Jejaring Collaborative Governance Pada Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Subang. *International Journal of Demos*, Vol. 1(2), Hal: 204-231.
- Mahlangu, P. d. (2019). Toward a Framework for Multisector and Multilevel collaboration: Case of HIV and AIDS Governance in South Africa. *Global Health Action*, Vol. 12, 1617393.

- Masriadi. (2014). *Epidomologi Penyakit Menular*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Metra, R. (2020). Implementasi Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 7, Hal: 1-11.
- Morse, R. S., & Jhon, B. S. (2012). Teaching Collaborative Governance: Phase, Competencies, and Case-Based Learning. *Journal of Public Affairs Education*, Vol.18, No 3.
- Noviana, N. (2013). *Catatan Kuliah Kesehatan Reproduksi & HIV-AIDS*. Jakarta Timur: CV Trans Media.
- Purwanti, N. D. (2016). *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintah Kolaboratif, Isu-isu Kontemporer)*. Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM.
- Purwanto, E. A. (2015). *Mengembangkan Porfesi Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Raharja, S. J., & Akhmad, D. (2019). Analisis Jaringan Kolaborasi Dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS: Tudi di Kabupaten Subang Jawa Barat. *Jurnal kependudukan Indonesia*, Vol. 14, Hal: 29-48.
- Siregar, F. A. (2004). *Pengenalan dan Pencegahan AIDS*. Fakultas Kesehtan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara.
- Sudarmo. (2011). *Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Solo: Smart Media.
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor: Erlangga.
- Trianda, N., & Nugraha, D. S. (2019). Pengaruh Good Governance da Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Implikasinya Pada Pelayanan Publik (Studi Kasus di Pemerinthan Kabupaten Garut).
- Wulandari, F. (2019). *Kolaborasi Organisasi Terhadap Perlindungan dan Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone)*. Universtas Muhammadiyah Makassar